

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALKAN TAHUN 2023
DINAS KOPERASI, UKM & TENAGA KERJA

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar hukum pengecualian informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Pribadi dan Identitas Pelapor/Pengadu	Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses penanganan aduan dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Menjaga suasana kondusif selama proses penyelesaian aduan & mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	1. Permanen 2. atas persetujuan yang bersangkutan
2	Username dan Password pengguna Aplikasi	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menjaga pertahanan dan keamanan negara	Selama berlaku
3	Surat pengaduan masyarakat	2. Pasal 17 huruf f dan j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan	1. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat	Tidak terbatas
			2. Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	2. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan	
4	Surat Rahasia	1. UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
5	Disposisi surat pimpinan	2. Pasal 17 huruf a dan j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat kebijakan pemerintah daerah	Memperlancar proses dan kebijakan pemerintah	Setelah nota kesepahaman direalisasikan/dilaksanakan
		1. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut dari Sekretariat atau Bidang pengolah surat
6	Rencana pelaksanaan tukar menukar/pemindahtanganan barang daerah	1. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 2. Pasal 17 huruf a, j dan j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi keterlibatan pihak spekulasi sehingga merugikan daerah	Menutup peluang kerugian yang ditimbulkan oleh spekulasi dan orientasi kepentingan umum dapat	Setelah proses selesai

7	Rancangan Peraturan/Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM & Tenaga Kerja	1. Pasal 17 huruf e dan j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan	1. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat	Tidak terbatas
			2. Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	2. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan	
8	Berita acara pemeriksaan	1. UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	1. Dapat menghambat proses hukum/penyelidikan/penyidikan	1. Memperlancar proses hukum/penyelidikan/penyidikan	Tidak terbatas
		2. Pasal 17 huruf a, h dan j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2. Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/tidak boleh diungkap	2. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/tidak boleh diungkap	
9	Informasi perkara pelanggaran disiplin ASN di lingkungan Dinas Koperasi, UKM & Tenaga Kerja	1. Kep. Menkumham No. 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Permendagri No. 4 Tahun 2007 tentang PASN di Lingkungan Pemda	1. Dapat menghambat proses hukum/penyelidikan/penyidikan	1. Memperlancar proses hukum/penyelidikan/penyidikan	Tidak terbatas
		2. Pasal 17 huruf e dan j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2. Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/tidak boleh diungkap	2. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/tidak boleh diungkap	
10	Sistim Keamanan Informasi	1. Pasal 25 UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	1. Dapat menghambat proses hukum/penyelidikan/penyidikan	1. Memperlancar proses hukum/penyelidikan/penyidikan	Selama masih digunakan
		2. Pasal 17 huruf b, j dan j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2. Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/tidak boleh diungkap	2. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/tidak boleh diungkap	
11	Dokumen pengadaan barang dan jasa pemerintah	1. Perpres RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa	1. Dapat menghambat proses hukum/penyelidikan/penyidikan	1. Memperlancar proses hukum/penyelidikan/penyidikan	Sampai proses selesai/diketahui pemenangnya
		2. Pasal 17 huruf i dan j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2. Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/tidak boleh diungkap	2. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/tidak boleh diungkap	
12	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	1. Perpres RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa	1. Dapat menghambat proses hukum/penyelidikan/penyidikan	1. Memperlancar proses hukum/penyelidikan/penyidikan	Sampai diketahui pemenangnya
		2. Pasal 17 huruf b, j dan j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2. Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/tidak boleh diungkap	2. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/tidak boleh diungkap	

13	Dokumen penawaran kontrak	1. Perpres RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa 2. Pasal 17 huruf b, j dan l UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Dapat menjamin objektivitas penilaian/evaluasi penawaran	Sampai proses penawaran kontrak selesai
14	Laporan hasil Pemeriksaan (LHP)	1. Pasal 17 huruf i dan j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Atas ijin pihak yang melakukan pemeriksaan kasus atau atas perintah dari penegakan hukum
15	Soal-soal ujian/pre test/post test	1. Pasal 66 Ayat (3) UU No 43 Tahun 2009 tentang 2. Pasal 17 huruf i dan j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu akuntabilitas pelaksanaan ujian	Menjaga akuntabilitas dan menghindari kebocoran	Sampai selesainya pelaksanaan ujian
16	Penilaian uji kompetensi	Pasal 17 huruf h UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu akuntabilitas pelaksanaan ujian	Menjaga akuntabilitas dan menghindari kebocoran	Sampai selesainya uji kompetensi
17	Identitas ASN yang melanggar disiplin	Pasal 17 huruf a dan h UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu rahasia pribadi seseorang dan berpotensi untuk disalahgunakan	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Sampai ada pengajuan dari yang bersangkutan
18	Data rencana penempatan ASN	Pasal 17 huruf a dan l UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan	Menjaga kebijakan pemerintah supaya lebih terb	Sampai selesai proses penempatan yang bersangkutan
19	Notulen hasil sidang Baperjakat Internal Dinas Koperasi, UKM & Tenaga Kerja	Pasal 17 huruf h dan l UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu kebijakan pemerintah	Menjaga kebijakan pemerintah	Sampai hasil baperjakat ditindaklanjuti
20	Dokumen pertimbangan/rekomendasi Baperjakat Internal Dinas Koperasi, UKM & Tenaga Kerja	1. PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan ASN dalam jabatan struktural 2. Pasal 17 huruf i dan j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu kebijakan pemerintah	Menjaga kebijakan pemerintah	Sampai hasil baperjakat ditindaklanjuti

21	Dokumen pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN dalam dan dari jabatan struktural	1. PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan ASN dalam jabatan struktural 2. Pasal 17 huruf i dan j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait
22	Arsip SK Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN dalam dan dari jabatan struktural	1. PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan ASN dalam jabatan struktural BAB III 2. Keputusan Kepala BKN No. 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan ASN dalam jabatan struktural, sebagaimana diubah dengan PP No.13 Tahun 2002, Lampiran I angka Romawi II huruf B 3. Pasal 17 huruf i dan j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Pertimbangan-pertimbangannya dapat mengungkap rahasia jabatan yang bersangkutan	Mengamankan kesinambungan dan kebijakan pemerintah	Sesuai dengan ketentuan untuk tetap ditatausahakan sampai 30 tahun
23	Daftar Nilai DP3 dan SKP ASN	1. Pasal 5/6 PP No 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan ASN 2. Pasal 17 huruf h,i dan j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu privasi yang bersangkutan	Menjaga privasi yang bersangkutan	Atas "in yang bersangkutan ij
24	Keputusan penjatuhan hukum disiplin ASN	1. PP No.53 Tahun 2010 2. Perka BKN No.21 Tahun 2010 Romawi IX Angka 8 UU No.1 3. Pasal 17 huruf a,h dan i UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat berpotensi mengganggu objektivitas putusan yang akan dijatuhkan	Menjaga objektivitas putusan	Sampal turunnya penjatuhan hukum kesehatan
25	Keputusan ijin/keterangan tentang perceraian ASN	1. PP No.10 Tahun 1983 Jo.PP No.45 Tahun 1990 2. Pasal 17 huruf h,i dan j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi munculnya informasi yang tidak benar dan bisa menimbulkan fitnah	Menjaga objektivitas putusan	Sampai keluarnya putusan ijin

26	Dokumen pengelolaan kepegawaian '	1. PP No.9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, pemindahan, dan Pemberhentian ASN	Dapat mengungkap rahasia pribadi ASN yang bersangkutan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait
	a. Kenaikan pangkat	2. UU No.43 tahun 1989 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian			
	b. Kenaikan gaji berkala	3. Pasal 17 huruf h,j dan j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			
	c. Mutasi				
	d. Pensun				
	e. Administrasi kepegawaian		Mengganggu penyusunan kebijakan		
	27	Biodata elektronik ASN lengkap	1. UU No.11 tahun 2008 tentang ITE	Data yang bersifat pribadi bila dibuka akan mengganggu privasi yang bersangkutan	Untuk menjaga kerahasiaan ASN yang bersangkutan
2. Pasal 17 huruf h,j dan j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik					
28	Data kepegawaian perorangan ASN lengkap	1. UU No. 9 tahun 1974 jo. UU No. 43 Tahun 1989 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian	Mengganggu privasi seseorang	Mengamankan hak privasi seseorang	Selama yang bersangkutan berstatus ASN
		2. Pasal 17 huruf h,j dan j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			
29	Arsip data perorangan ASN	1. UU No. 9 tahun 1974 jo. UU No. 43 Tahun 1989 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian	Mengganggu privasi seseorang	Mengamankan hak privasi seseorang	Selama yang bersangkutan berstatus ASN
		2. Pasal 17 huruf h,j dan j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			
30	Daftar usulan pengangkatan ASN dalam jabatan struktural	1. PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan ASN dalam jabatan struktural	Dapat mengganggu kebijakan pemerintah/Pimpinan	Mengamankan kebijakan Pimpinan	Setelah usulan di relasikan
		2. Pasal 17 huruf l dan j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			

31	Daftar Pejabat yang akan dilantik	1. PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan ASN dalam jabatan struktural	Mengganggu proses penyusunan kebijakan karena ada pengungkapan yang mendahului	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK/Pelantikan
		2. Keputusan Kepala BKN No. 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan ASN dalam jabatan struktural, sebagaimana diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002, Lampiran I angka Romawi II huruf B			
		3. Pasal 17 huruf i dan j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			
32	Dokumen proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah/SPJ derikut lampirannya	Pasal 17 huruf i dan j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat kebijakan karena adanya penungkapan yang mendahului sebelum audit	Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Sampai dengan telah di audit oleh aparatut pemeriksa/pengawasan/auditor (BPKP/BPK)
33	Database objek pajak dan retribusi	1. Pasal 40 UU No. 11 Tahun 2002 tentang ITE	Melanggar privasi wajib pajak/retribusi	Menjaga privasi wajib pajak/retribusi	Atas iljin yang bersangkutan
		2. Pasal 17 huruf i dan j UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			

Painan, 14 April 2023

**PI.KEPALA DINAS
KOPERASI, UKM & TENAGA KERJA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**


JAFRI WANDI, SKM, MT
NIP. 19650603 198602 2 001